



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 150/PL.02.2-Kpt/7503/Kab/VIII/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020  
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang  
Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit sebagai  
Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik  
atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten  
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor**

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua



atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 417/PL.01.7-Kpt/7503/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 424/PL.01.9-Kpt/7503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 263/PL.02.2-BA/7503/Kab/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 berdasarkan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 424/PL.01.9-Kpt/7503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.

**KEDUA :** Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu Tahun 2019 yaitu  $20\% \times 25 \text{ Kursi} = 5$  (lima) kursi;



- KETIGA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 adalah  $25\% \times 100.360 = 25.090$  (dua puluh lima ribu sembilan puluh) suara sah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 3 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Ttd

**ADNAN A. BERAHIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Anu